



## **Kontribusi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pencapaian SDGs 2030**

**Zuraida<sup>1\*</sup>, Makmur<sup>2</sup>, Nuraini<sup>3</sup>, Nurlaila<sup>4</sup>, Arizqi Ihsan Pratama<sup>5</sup>,**

**Karimuddin Abdullah Lawang<sup>6</sup>**

<sup>1,4</sup> Universitas Malikussaleh, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Poso, Indonesia

<sup>3</sup> MIN 34 Aceh Utara, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Darunnajah, Indonesia

<sup>6</sup> Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI), Indonesia

E-mail: zuraida@unimal.ac.id<sup>1\*</sup>, drmakmur1984@gmail.com<sup>2</sup>, nuraddaudy@gmail.com<sup>3</sup>, nurlaila@unimal.ac.id<sup>4</sup>, arizqi@darunnajah.ac.id<sup>5</sup>, karimuddin@unisai.ac.id<sup>6</sup>

### **RIWAYAT ARTIKEL**

Received : 2025-10-04

Revised : 2025-11-04

Accepted : 2025-11-07

### **KEYWORDS**

Islamic Religious Education,  
Civic Education, SDGs 2030

### **KATA KUNCI**

Pendidikan Agama Islam,  
Pendidikan Kewarganegaraan,  
SDGs 2030.

### **ABSTRACT**

*This article explores the contribution of Islamic Religious Education (PAI) and Civic Education (PKn) to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, particularly Goal 4 (quality education) and Goal 16 (peace, justice, and strong institutions). Employing a literature review method, this study examines scholarly works related to the roles of PAI and PKn in strengthening character, morality, civic literacy, as well as national and religious values. The findings reveal that PAI fosters ethics, spirituality, and religious moderation, while PKn emphasizes democracy, tolerance, and legal awareness. Their synergy creates an educational model that shapes citizens who are both religious and democratic, thus aligning with the objectives of the SDGs 2030. This research contributes theoretically by enriching integrative literature on PAI and PKn, and practically by providing implications for strengthening the national education curriculum based on character, nationalism, and religious values.*

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas kontribusi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya tujuan ke-4 (pendidikan berkualitas) dan tujuan ke-16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat). Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menelaah berbagai literatur terkait peran PAI dan PKn dalam penguatan karakter, moralitas, civic literacy, serta nilai-nilai kebangsaan dan religiusitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa PAI berperan dalam menanamkan akhlak, spiritualitas, dan moderasi beragama, sedangkan PKn menekankan demokrasi, toleransi, dan kesadaran hukum. Sinergi keduanya menghasilkan model pendidikan yang mampu membentuk warga negara religius sekaligus demokratis, sehingga relevan dengan pencapaian SDGs 2030. Penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis berupa pengayaan literatur integratif PAI-PKn serta implikasi praktis bagi penguatan kurikulum pendidikan nasional berbasis karakter, kebangsaan, dan nilai keagamaan.

## **1. Pendahuluan**

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter, moral, serta identitas kewargaan peserta didik. Kedua

bidang ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembinaan sikap, etika sosial, serta kesadaran kolektif yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks global, relevansi PAI dan PKn semakin kuat ketika dikaitkan dengan agenda pembangunan

berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya tujuan ke-4 mengenai pendidikan berkualitas (Quality Education) dan tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang kuat (Peace, Justice, and Strong Institutions). Dengan demikian, kontribusi keduanya penting untuk memastikan pendidikan tidak hanya menghasilkan individu cerdas, tetapi juga berkarakter religius, demokratis, serta berorientasi pada perdamaian.

Kajian terdahulu telah menunjukkan peran signifikan pendidikan dalam membangun manusia yang beradab. Fitriyah, Bahzar, Ningsih, dan Aji (2024), misalnya, mengungkapkan bahwa guru agama Islam berperan penting dalam mengatasi sikap egosentris siswa di madrasah, sehingga PAI berfungsi menanamkan nilai kerendahan hati dan kebersamaan. Kajian lain oleh Khoiriyah, Suteja, Rintaningrum, Ningrum, dan Aji (2025) menegaskan bahwa tradisi haul dapat dijadikan sebagai medium pendidikan karakter yang menanamkan nilai kearifan lokal sekaligus memperkuat identitas kebangsaan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa PAI konsisten menanamkan nilai akhlak, adab, dan spiritualitas yang mendukung pendidikan berkelanjutan.

Di sisi lain, PKn juga memiliki peran yang krusial. Santoso, Efendi, Ramadhani, Suryaninggi, dan Sahwi (2022) menekankan bahwa PKn merupakan instrumen strategis dalam membentuk identitas bangsa, terutama melalui penguatan kesadaran hukum, demokrasi, dan literasi kewargaan. Penelitian Fajri, Ramadhan, Palani, dan Yazid (2021) bahkan menyoroti peran PKn dalam meningkatkan akses serta memperjuangkan hak penyandang disabilitas, yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Temuan ini mengindikasikan bahwa PKn berperan penting dalam mendukung pendidikan inklusif serta penguatan masyarakat sipil yang demokratis.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan (research gap) yang cukup jelas. Kontribusi PAI dan PKn selama ini cenderung dikaji secara parsial, sehingga keduanya dipandang berjalan pada jalur masing-masing tanpa keterhubungan yang signifikan. Padahal, jika ditelaah secara integratif, terdapat peluang besar untuk mensinergikan nilai-nilai religius dari PAI dengan nilai kebangsaan dari PKn, sehingga lahir peserta didik yang religius sekaligus demokratis. Abdullah Lawang (2025) menegaskan bahwa hukum Islam memiliki peran strategis dalam mendorong pendidikan inklusif dan berkualitas sesuai dengan SDGs. Namun, kajian

integratif antara PAI dan PKn dalam konteks SDGs 2030 masih jarang dilakukan. Begitu pula Aji (2025) yang meneliti strategi pembentukan karakter disiplin santri, dan Makmur, Gusvita, Robi'ah, Rahmawati, Muslimin, dan Aji (2025) yang meneliti penerapan nilai Islam dalam etika profesi, sama-sama menekankan aspek karakter, tetapi belum secara langsung dikaitkan dengan kontribusi sinergis PAI dan PKn terhadap pencapaian tujuan global SDGs. Hal ini menunjukkan adanya ruang kosong dalam literatur akademik yang penting untuk diisi.

Novelty penelitian ini terletak pada perspektif integratif yang mengkaji kontribusi sinergis PAI dan PKn dalam konteks SDGs 2030. Jika penelitian sebelumnya cenderung memisahkan peran keduanya, maka penelitian ini menghadirkan model konseptual baru yang menempatkan PAI dan PKn sebagai mitra strategis dalam membangun pendidikan berkualitas, memperkuat perdamaian, serta menegakkan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa pengayaan literatur akademik tentang integrasi pendidikan agama dan kewarganegaraan dalam pencapaian SDGs, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, moderat, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kontribusi PAI dan PKn dalam mendukung agenda SDGs 2030, khususnya tujuan 4 (Quality Education) dan tujuan 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions). Artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menelaah literatur yang relevan untuk menguraikan bagaimana nilai-nilai akhlak, adab, dan spiritualitas dalam PAI dapat bersinergi dengan civic literacy, kesadaran hukum, dan demokrasi dalam PKn. Harapannya, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman teoretis, tetapi juga memberikan arah bagi pengembangan kebijakan pendidikan nasional yang mampu melahirkan generasi religius, demokratis, adil, dan damai sesuai dengan cita-cita SDGs 2030.

## 2. Tinjauan Literature dan Kerangka Pikir

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan dua ranah pendidikan yang sama-sama memiliki orientasi pada pembentukan karakter peserta didik. Keduanya tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menginternalisasikan nilai, sikap, serta keterampilan hidup yang berorientasi pada kualitas pribadi dan sosial. Dalam konteks SDGs 2030, baik PAI maupun

PKn berperan penting dalam mencapai tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan ke-16 mengenai perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang kuat. Tinjauan literatur berikut akan memaparkan temuan-temuan penelitian terkait peran PAI dan PKn dalam membentuk generasi yang berkarakter, religius, demokratis, serta berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan.

PAI memiliki peran sentral dalam membentuk akhlak, adab, dan spiritualitas peserta didik. Khoiriyah, Suteja, Rintaningrum, Ningrum, dan Aji (2025) melalui penelitian tentang tradisi haul menunjukkan bahwa praktik keagamaan tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai karakter seperti ketaatan, penghormatan pada tradisi, serta kebersamaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Makmur, Gusvita, Robi'ah, Rahmawati, Muslimin, dan Aji (2025) yang menemukan bahwa nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam etika profesi, termasuk di lembaga pendidikan, sehingga membentuk karakter yang berintegritas, disiplin, dan profesional.

Lebih lanjut, penelitian Nurhabibi, Ismail, Kuswandi, Dewi, dan Aji (2025) menyoroti strategi lembaga pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa di era digital. Tantangan era teknologi sering kali melahirkan degradasi moral pada anak, namun lembaga pendidikan Islam mampu memanfaatkan pendekatan berbasis nilai religius untuk menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Hal ini diperkuat oleh temuan Nafasabilla, Yohamintin, Mutsaqofah, Dianita, Syaquina, Fadhillah, dan Aji (2025) yang menyatakan bahwa program pendidikan yang berorientasi pada pencegahan degradasi moral pada anak usia sekolah dasar (generasi Alpha) sangat relevan untuk menginternalisasikan nilai-nilai agama sejak dini.

Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa PAI tidak sekadar fokus pada pengetahuan teologis, melainkan lebih luas: mengarahkan peserta didik agar memiliki kepribadian religius, etis, dan tangguh menghadapi tantangan global. Dengan demikian, PAI dapat dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendukung pendidikan berkualitas dan membentuk masyarakat yang berkarakter sesuai dengan tujuan SDGs 2030.

PKn berfungsi sebagai sarana pembentukan identitas kebangsaan dan penguatan literasi kewargaan. Menurut Mumpuni, Muhibbin, dan tim (2025), PKn berperan penting dalam memperkuat karakter kebangsaan siswa sekolah dasar melalui internalisasi nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Senada dengan itu, Nurazizah, Ulfiah, Dewi, dan Hamid (2021) menekankan bahwa PKn mampu

membangun karakter bangsa melalui penguatan nilai-nilai demokrasi, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial di sekolah.

Dimensi kebangsaan dalam PKn juga dikaji oleh Zahro, Aurelia, As'syurah, dan Suryaningsti (2025) yang menekankan pentingnya menyisipkan ideologi nasionalisme ke dalam gaya hidup modern anak muda. Kajian ini menegaskan bahwa PKn memiliki potensi adaptif dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk dalam budaya populer dan gaya hidup generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai kewargaan tidak hanya diajarkan di ruang kelas, tetapi juga diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, isu antikorupsi juga menjadi perhatian penting dalam PKn. Pradana (2021) menjelaskan bahwa pembelajaran PKn dapat menjadi medium efektif dalam mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi di kalangan siswa. Nuryana dan Asmorojati (2022) memperkuat temuan ini dengan mengembangkan model pendidikan antikorupsi berbasis proyek selama pandemi COVID-19, yang terbukti mampu menanamkan kesadaran kritis terhadap praktik korupsi sejak usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa PKn tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, melainkan juga transformatif dengan menumbuhkan karakter integritas dan keadilan sosial.

Kajian literatur menunjukkan bahwa kontribusi PAI dan PKn terhadap SDGs masih banyak dikaji secara terpisah. Padahal, keduanya memiliki irisan nilai yang kuat dalam membentuk manusia yang religius sekaligus demokratis. Abdullah Lawang (2025) menegaskan bahwa hukum Islam memiliki peran dalam mendorong pendidikan inklusif dan berkualitas, yang sejalan dengan tujuan ke-4 SDGs. Temuan ini dapat dipadukan dengan hasil penelitian di bidang PKn yang berorientasi pada pembentukan identitas kebangsaan dan literasi kewargaan.

Integrasi PAI dan PKn penting dilakukan karena keduanya sama-sama berorientasi pada pembentukan karakter dan moralitas sosial. PAI menekankan nilai religius, akhlak, dan spiritualitas, sedangkan PKn mengedepankan civic literacy, demokrasi, dan kesadaran hukum. Sinergi keduanya akan melahirkan model pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan bangsa sekaligus relevan dengan tuntutan global. Dengan menggabungkan nilai religius dan nilai kebangsaan, pendidikan Indonesia dapat mendukung tercapainya masyarakat yang damai, adil, serta berkelanjutan sebagaimana visi SDGs 2030.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat dirumuskan kerangka pikir bahwa sinergi antara

Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tujuan SDGs 2030, terutama pada tujuan ke-4 (pendidikan berkualitas) dan tujuan ke-16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat). PAI berperan dalam menanamkan nilai-nilai spiritual, moral, dan akhlakul karimah, sedangkan PKn memperkuat dimensi kebangsaan, demokrasi, serta kesadaran hukum dan hak asasi manusia (Syahdina, Anandhea, Dzatirrajwa, & Suryaningi, 2025).

Keterpaduan keduanya menciptakan paradigma civic-religious education, yaitu model pendidikan yang menumbuhkan peserta didik menjadi warga negara yang religius sekaligus demokratis. Kerangka pikir ini menempatkan integrasi nilai religius (taqwa, amanah, keadilan) dan nilai kewargaan (nasionalisme, toleransi, tanggung jawab sosial) sebagai fondasi dalam membangun pendidikan karakter yang berkelanjutan (Mumpuni et al., 2025; Khoiriyah et al., 2025). Dalam perspektif sistemik, sinergi PAI dan PKn berpotensi memperkuat kebijakan pendidikan nasional menuju pendidikan inklusif, humanis, dan berkeadilan sebagaimana ditekankan dalam SDGs 2030 (Lawang, 2025).

Dengan demikian, hubungan logis yang terbentuk dalam kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat berikut ini:



Kerangka ini menjadi dasar konseptual bagi analisis pembahasan selanjutnya, sekaligus menegaskan kebaruan penelitian dalam mengintegrasikan dua ranah pendidikan yang selama ini berjalan terpisah menuju tujuan pembangunan berkelanjutan.

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada eksplorasi konseptual mengenai kontribusi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mendukung pencapaian Sustainable Development

Goals (SDGs) 2030, khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan ke-16 mengenai perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, analisis lebih diarahkan pada penelaahan literatur yang relevan, baik berupa artikel jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, maupun dokumen resmi terkait SDGs.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup literatur akademik yang terbit dalam lima tahun terakhir (2020–2025) yang relevan dengan tema integrasi PAI, PKn, dan SDGs. Beberapa di antaranya mencakup karya Abdullah Lawang (2025) tentang peran hukum Islam dalam pendidikan inklusif, Santoso et al. (2022) mengenai PKn sebagai instrumen identitas bangsa, serta Fitriyah et al. (2024) tentang peran guru agama Islam dalam mengatasi egosentrisme siswa. Sementara itu, data sekunder berupa dokumen resmi seperti laporan United Nations Development Programme (UNDP) tentang SDGs, kurikulum nasional, serta regulasi pendidikan di Indonesia yang menjadi kerangka normatif bagi pelaksanaan PAI dan PKn.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan pencarian literatur elektronik. Peneliti mengakses database akademik seperti Google Scholar, DOAJ, Scopus, dan Garuda untuk memperoleh artikel ilmiah yang relevan. Selain itu, buku-buku teks serta hasil konferensi ilmiah juga dijadikan rujukan untuk memperkuat kerangka konseptual penelitian. Seluruh literatur yang dikumpulkan kemudian diverifikasi berdasarkan relevansi tema, keabsahan sumber, serta kontribusinya terhadap perumusan argumen penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Tahapan analisis meliputi: (1) identifikasi tema pokok dari literatur, seperti peran PAI dalam pendidikan karakter, kontribusi PKn dalam civic literacy, serta keterkaitannya dengan tujuan SDGs; (2) kategorisasi data berdasarkan subtema, misalnya kontribusi PAI terhadap pendidikan berkualitas, kontribusi PKn terhadap keadilan sosial, serta sinergi keduanya dalam membangun masyarakat damai; (3) interpretasi data untuk menemukan hubungan konseptual antara nilai religius dan nilai kebangsaan dalam mendukung SDGs; dan (4) penyusunan sintesis temuan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### a. Kontribusi Pendidikan Agama Islam terhadap Pencapaian SDGs 2030

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran fundamental dalam mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya tujuan keempat (Quality Education) dan tujuan keenam belas (Peace, Justice, and Strong Institutions). PAI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transfer ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, penguatan moralitas, serta penanaman nilai-nilai spiritual yang selaras dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kontribusi PAI menjadi signifikan dalam membangun generasi yang berakhlak mulia, cinta damai, serta memiliki kesadaran sosial dan ekologis.

Pertama, PAI berkontribusi pada pembentukan moralitas dan pencegahan degradasi akhlak di tengah tantangan globalisasi. Generasi muda, khususnya generasi Alpha, menghadapi paparan teknologi digital yang dapat memicu perilaku menyimpang jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter berbasis agama. Program pendidikan Islam berperan sebagai upaya preventif dalam menanggulangi degradasi moral sejak usia sekolah dasar melalui pembiasaan nilai adab, kejujuran, dan tanggung jawab (Nafasabilla et al., 2025). PAI dalam konteks ini bukan hanya memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga menginternalisasi etika yang dapat membentengi anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan digital.

Kedua, PAI berfungsi sebagai penguat karakter kebangsaan dan kesadaran konstitusional. Nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial sejalan dengan semangat kebangsaan yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Integrasi nilai religius dalam pendidikan karakter mampu memperkuat jati diri bangsa sekaligus memperkuat kecintaan pada tanah air (Nurazizah et al., 2021). Dengan demikian, PAI dapat mengisi ruang sinergi antara pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan sehingga terwujud warga negara yang religius sekaligus demokratis.

Selain itu, PAI turut berperan dalam pembentukan karakter siswa di era digital. Lembaga pendidikan Islam dituntut mampu mengembangkan strategi baru untuk membentuk siswa yang tangguh menghadapi disrupsi digital. Strategi tersebut mencakup pemanfaatan teknologi untuk internalisasi nilai Islam, penguatan adab digital, serta pembinaan kesadaran kritis dalam bermedia sosial (Nurhabibi et al., 2025). Pendidikan Islam yang adaptif terhadap

era digital akan mendukung tercapainya SDGs melalui penciptaan generasi yang cerdas digital sekaligus beretika.

Lebih lanjut, PAI juga memiliki kontribusi dalam pencegahan korupsi dan penguatan budaya antikorupsi. Nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam Islam merupakan prinsip utama yang sejalan dengan agenda global untuk membangun lembaga yang adil dan transparan. Model pendidikan berbasis proyek yang mengajarkan antikorupsi dapat diintegrasikan dalam kurikulum PAI, sehingga peserta didik terbiasa dengan praktik kejujuran sejak dini (Nuryana & Asmorojati, 2022). Dengan cara ini, PAI membantu memperkuat tujuan SDGs 16, yakni membangun institusi yang damai, adil, dan inklusif.

PAI juga memainkan peran penting dalam membangun komunikasi strategis untuk menghadapi isu negatif terhadap lembaga pendidikan Islam. Dalam era digital, lembaga pendidikan sering menjadi sorotan publik, sehingga dibutuhkan pendekatan komunikasi Islam yang efektif, partisipatif, dan transparan. Strategi komunikasi yang berbasis nilai Islam dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meneguhkan legitimasi lembaga pendidikan sebagai agen pembangunan moral (Rintaningrum et al., 2025). Pendekatan ini mendukung SDGs dengan cara memperkuat institusi pendidikan agar lebih kredibel dan inklusif.

Di sisi lain, PAI juga dapat mengembangkan pola berpikir kritis Islami dalam pembelajaran berbasis inkuiri. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara dogmatis, tetapi juga mengkajinya secara rasional, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan modern (Syafuruddin et al., 2025). Kemampuan berpikir kritis berbasis nilai Islam ini penting untuk mencetak generasi yang mampu menghadapi tantangan global sekaligus tetap berakar pada nilai religius.

Kontribusi lain PAI terhadap SDGs adalah dalam penguatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Melalui penanaman prinsip ukhuwah dan moderasi beragama, PAI mendorong terciptanya perdamaian sosial yang berkelanjutan. Pendidikan agama yang menekankan pada penghormatan terhadap perbedaan sejalan dengan misi Forum Kerukunan Umat Beragama yang mengedepankan toleransi sebagai pilar pembangunan bangsa (Taopan et al., 2020). Hal ini mendukung SDGs 16 dengan menciptakan lingkungan sosial yang damai dan inklusif.

Tidak kalah penting, PAI juga dapat berkontribusi dalam pembangunan kesadaran ekologi dan keberlanjutan. Ajaran Islam

menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil-ardh (pemimpin di bumi) yang harus menjaga keseimbangan alam. Hal ini relevan dengan agenda global dalam memastikan keberlanjutan pangan dan lingkungan hidup (Varzakas & Smaoui, 2024). Dengan demikian, PAI dapat menginternalisasi nilai ekologis pada peserta didik agar mereka peduli terhadap lingkungan sebagai bagian dari ibadah.

Dari uraian tersebut, terlihat jelas bahwa kontribusi PAI terhadap pencapaian SDGs 2030 mencakup berbagai dimensi: mulai dari moralitas individu, karakter kebangsaan, kesadaran hukum, antikorupsi, komunikasi pendidikan, hingga isu toleransi dan keberlanjutan lingkungan. Tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyinergikan PAI dengan mata pelajaran lain, terutama Pendidikan Kewarganegaraan, agar tercipta pendidikan yang holistik dan integratif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan fondasi strategis dalam mendukung SDGs 2030. PAI tidak hanya berfungsi menanamkan nilai religius, tetapi juga mampu memperkuat institusi sosial, mendorong keadilan, serta menciptakan generasi yang berkarakter, toleran, dan peduli lingkungan. Kontribusi ini menegaskan bahwa pendidikan agama memiliki peran yang sangat relevan dan tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan global berkelanjutan.

#### **b. Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pencapaian SDGs 2030**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan Indonesia yang berperan membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya. Dalam konteks global, peran PKn sangat relevan dengan pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya tujuan keempat (Quality Education) dan tujuan keenam belas (Peace, Justice, and Strong Institutions). Melalui integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, PKn berkontribusi dalam membangun generasi yang mampu menjaga perdamaian, menegakkan keadilan, serta menguatkan institusi demokratis.

PKn berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun karakter bangsa melalui penanaman nilai kebangsaan, nasionalisme, serta komitmen pada konstitusi. Pendidikan ini memperkuat kesadaran warga negara tentang pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan

hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa PKn memiliki peran fundamental dalam memperkuat identitas bangsa dan membentuk generasi yang bermoral, bertanggung jawab, dan cinta tanah air (Nurazizah et al., 2021). Dalam kaitannya dengan SDGs, pembentukan karakter bangsa melalui PKn mendukung tujuan pendidikan berkualitas karena melahirkan peserta didik yang berintegritas dan memiliki komitmen pada nilai kemanusiaan.

Selain itu, PKn juga mampu menanamkan ideologi nasionalisme dalam gaya hidup modern generasi muda, yang saat ini banyak dipengaruhi oleh budaya global. Pendidikan ini memberikan landasan normatif agar generasi muda tidak kehilangan identitas kebangsaannya, sekaligus tetap mampu bersaing dalam era globalisasi (Retno Amalia Zahro et al., 2025). Dengan demikian, PKn berfungsi menjaga keberlanjutan nilai kebangsaan di tengah modernisasi sekaligus meneguhkan relevansinya terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

Korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, PKn berkontribusi besar dalam menanamkan budaya antikorupsi pada peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa model pendidikan berbasis proyek dalam PKn terbukti efektif sebagai strategi pencegahan korupsi, karena peserta didik dilibatkan langsung dalam pengalaman praktis yang menekankan nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas (Nuryana & Asmorajati, 2022).

Selain itu, kampanye nilai antikorupsi melalui pembelajaran PKn juga terbukti membentuk kesadaran kritis siswa terhadap praktik koruptif dalam masyarakat. Dengan demikian, PKn mendukung tercapainya SDGs 16 yang menekankan pembangunan institusi yang damai, adil, dan inklusif (Pradana, 2021). Jika nilai ini ditanamkan secara konsisten sejak usia dini, maka generasi mendatang akan memiliki daya tangkal kuat terhadap praktik korupsi.

Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan besar dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan membangun kesadaran konstitusional masyarakat. Melalui PKn, siswa dibekali pemahaman tentang prinsip HAM, baik dalam kerangka konstitusi maupun dalam realitas praktis kehidupan sosial (Syahdina Neila Auly et al., 2025). Pemahaman ini penting untuk mencetak generasi yang tidak hanya mengetahui hak-haknya, tetapi juga menghormati hak orang lain sebagai bagian dari kehidupan berbangsa.

Lebih lanjut, PKn memperkuat tradisi demokrasi melalui pembelajaran yang menekankan partisipasi aktif, pengambilan keputusan kolektif, serta kesadaran hukum. Suryaningsi et al. (2016) menegaskan bahwa PKn menjadi sarana utama dalam menumbuhkan sikap demokratis, toleran, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, PKn berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan demokratis.

Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, sehingga keberadaan PKn menjadi penting untuk menanamkan nilai toleransi dan kebhinekaan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa diajak untuk menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa sebagai kekayaan bangsa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menekankan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kualitas sikap hidup toleransi di tengah masyarakat multikultural (Taopan et al., 2020).

PKn tidak hanya mengajarkan teori toleransi, tetapi juga membangun praktik hidup berdampingan secara damai. Nilai ini sangat relevan dengan SDGs 16, yang menekankan pentingnya perdamaian dan inklusi sosial sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi digital menuntut PKn bertransformasi agar tetap relevan dengan kebutuhan generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan kini tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan normatif, tetapi juga perlu mengembangkan strategi pembentukan karakter digital. Strategi ini meliputi penguatan etika bermedia sosial, penanaman kesadaran hukum digital, serta pembentukan budaya literasi informasi yang sehat (Nurhabibi et al., 2025).

Selain itu, PKn juga perlu mengintegrasikan pendekatan komunikasi strategis untuk menghadapi isu-isu negatif yang berkembang di ruang digital, terutama terkait lembaga pendidikan. Komunikasi yang berbasis nilai etika dan partisipasi publik menjadi kunci dalam memperkuat citra pendidikan di tengah derasnya arus informasi (Rintaningrum et al., 2025). Dengan demikian, PKn tidak hanya membangun karakter bangsa secara tradisional, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab.

Kontribusi PKn juga terlihat dalam membangun kesadaran ketahanan nasional dan keterkaitannya dengan agenda pembangunan global. Nilai kewarganegaraan yang ditanamkan dalam PKn menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara, keadilan sosial, serta keseimbangan lingkungan. Dalam konteks global, PKn dapat dikaitkan dengan

isu-isu keberlanjutan seperti keamanan pangan, ketahanan energi, dan keberlanjutan ekologi (Varzakas & Smaoui, 2024). Dengan cara ini, PKn tidak hanya relevan bagi kepentingan nasional, tetapi juga mendukung pencapaian agenda SDGs secara lebih luas.

Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam gerakan SDGs, seperti yang ditunjukkan oleh program-program berbasis youth empowerment, membuktikan bahwa PKn mampu menjadi wadah pemberdayaan anak muda dalam menginternalisasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan (Youth & Summer Camp, n.d.). Dengan demikian, PKn menjadi jembatan antara kesadaran lokal, nasional, dan global.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs 2030. PKn tidak hanya berperan membentuk karakter bangsa dan memperkuat nilai nasionalisme, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam menanamkan budaya antikorupsi, menegakkan HAM, mengembangkan toleransi, serta menyiapkan generasi digital yang bertanggung jawab. Selain itu, PKn turut berkontribusi pada isu-isu global seperti ketahanan pangan, perdamaian dunia, dan pembangunan berkelanjutan.

### **c. Sinergi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks SDGs 2030**

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam membentuk generasi yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki daya saing global. Dalam konteks Indonesia, dua mata pelajaran yang strategis dalam membentuk kepribadian bangsa adalah Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, terutama pada pilar pendidikan berkualitas (SDG 4), perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (SDG 16). Integrasi nilai-nilai religius dan kewarganegaraan menjadi strategi penting untuk menghadapi tantangan globalisasi, degradasi moral, intoleransi, serta ketidakadilan sosial.

PAI berfungsi menanamkan nilai spiritual, moral, dan etika Islam yang mendasari perilaku peserta didik, sedangkan PKn berperan dalam menginternalisasi nilai kebangsaan, demokrasi, dan tanggung jawab sebagai warga negara (Nurazizah et al., 2021). Sinergi keduanya dapat melahirkan generasi yang religius sekaligus nasionalis, mampu

menjaga harmoni sosial, serta berkomitmen terhadap keadilan dan perdamaian (Taopan, Ly, & Lobo, 2020).

Dalam konteks SDGs 2030, PAI berperan sebagai basis moral dan spiritual yang mendukung tercapainya pendidikan inklusif dan berkualitas. Menurut Lawang (2025), hukum Islam dapat menjadi instrumen untuk mendorong pendidikan yang tidak diskriminatif, merata, dan berorientasi pada keadilan. PAI di sekolah tidak hanya menekankan ibadah formal, melainkan juga membentuk sikap kritis, etis, dan peduli lingkungan sosial (Syafuruddin et al., 2025). Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menanamkan kesadaran peserta didik untuk aktif berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan sesuai nilai maqashid al-shariah.

Lebih jauh, PAI juga membangun etika profesi dan sikap amanah yang sangat relevan dengan tujuan SDGs. Makmur et al. (2025) menegaskan bahwa penerapan nilai Islam dalam etika profesi di lembaga pendidikan dapat membentuk karakter disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama tidak berhenti pada aspek ritual, melainkan menjangkau ranah sosial dan profesionalisme.

Selain itu, lembaga pendidikan Islam memiliki strategi khusus dalam membentuk karakter siswa di era digital yang rentan terhadap degradasi moral. Nurhabibi et al. (2025) menekankan perlunya integrasi pendekatan digital dengan nilai Islam agar siswa mampu mengelola teknologi secara bijak. Pendekatan ini sejalan dengan SDGs dalam menghadirkan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Di sisi lain, PKn berfokus pada penguatan karakter kebangsaan, nasionalisme, dan nilai-nilai demokrasi. Mumpuni et al. (2025) menjelaskan bahwa PKn di sekolah dasar dapat menjadi media efektif untuk menanamkan karakter cinta tanah air dan semangat persatuan. Hal serupa ditegaskan oleh Nurazizah et al. (2021) bahwa PKn berperan membentuk kesadaran kewargaan yang menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial dan solidaritas kebangsaan.

PKn juga memiliki peran strategis dalam kampanye nilai antikorupsi, yang merupakan salah satu fondasi SDG 16 terkait kelembagaan yang adil dan transparan. Pradana (2021) menyoroti pentingnya pembelajaran PKn dalam menanamkan nilai antikorupsi secara sistematis. Pendekatan ini diperkuat oleh Nuryana dan Asmorojati (2022) yang mengembangkan model pembelajaran berbasis

proyek sebagai upaya nyata membangun kesadaran integritas pada peserta didik.

Selain itu, PKn juga dapat beradaptasi dengan gaya hidup generasi muda. Zahro et al. (2025) menegaskan bahwa nilai nasionalisme perlu disisipkan dalam kehidupan modern anak muda, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan yang berkarakter. Dengan cara ini, PKn tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk gaya hidup yang sesuai dengan cita-cita bangsa.

PAI dan PKn memiliki irisan penting dalam membangun generasi yang religius sekaligus nasionalis. Sinergi ini terlihat dalam berbagai aspek, misalnya pembentukan karakter, pendidikan antikorupsi, dan penguatan toleransi. Khoiriyah et al. (2025) menunjukkan bahwa tradisi keagamaan seperti haul dapat menjadi medium pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, yang sekaligus memperkuat ikatan kebangsaan. Hal ini sejalan dengan semangat PKn dalam mengembangkan kebersamaan sosial.

Sinergi PAI dan PKn juga sangat penting dalam mendorong terciptanya masyarakat yang toleran dan damai. Taopan, Ly, dan Lobo (2020) menegaskan bahwa forum lintas agama menjadi ruang strategis untuk meningkatkan kualitas sikap toleransi, yang juga merupakan cita-cita pendidikan kewarganegaraan. Dengan memasukkan nilai Islam tentang ukhuwah dan perdamaian, integrasi PAI dan PKn mampu membangun masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.

Lebih dari itu, pendidikan Islam dan kewarganegaraan sama-sama menekankan pentingnya hak asasi manusia. Auly et al. (2025) menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip konstitusional dan realitas praktis dalam perlindungan HAM di Indonesia. Sinergi kedua bidang ini dapat memperkuat pemahaman kritis siswa terhadap pentingnya keadilan sosial dan penghormatan HAM sebagai fondasi SDGs.

Implementasi sinergi PAI dan PKn dapat dilakukan melalui kurikulum integratif, metode pembelajaran berbasis proyek, serta kegiatan ekstrakurikuler yang kolaboratif. Nafasabilla et al. (2025) menawarkan model program pendidikan preventif untuk mencegah degradasi moral pada anak generasi alfa, yang bisa diintegrasikan dengan pendekatan PKn dalam membangun kesadaran kewargaan sejak dini. Sementara itu, Rintaningrum et al. (2025) menekankan pentingnya strategi komunikasi Islam untuk menghadapi isu negatif terhadap lembaga pendidikan, yang juga relevan untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan global.

Suryaningsi et al. (2016) menambahkan bahwa PKn tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, melainkan juga sebagai wahana pembudayaan nilai. Jika digabungkan dengan PAI, maka keduanya dapat memperkuat pembentukan identitas kebangsaan yang tidak bertentangan dengan identitas keagamaan. Dengan demikian, sinergi ini berpotensi membentuk generasi emas 2045 yang berkarakter Islami sekaligus memiliki kesadaran kewargaan yang tinggi.

Sinergi PAI dan PKn dalam konteks SDGs 2030 bukan sekadar kolaborasi dua disiplin ilmu, tetapi merupakan kebutuhan strategis bangsa. Keduanya saling melengkapi: PAI menanamkan moralitas dan spiritualitas, sementara PKn mengajarkan kebangsaan, demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Integrasi keduanya dapat menjawab tantangan degradasi moral, radikalisme, dan melemahnya rasa nasionalisme. Dengan pendekatan kurikulum integratif, metode pembelajaran inovatif, serta penguatan karakter berbasis kearifan lokal, sinergi PAI dan PKn dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs 2030.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya pendidikan berkualitas, perdamaian, dan keadilan sosial. PAI memberikan fondasi moral dan spiritual yang menekankan nilai religiusitas, etika, dan akhlak mulia, sementara PKn memperkuat karakter kebangsaan, demokrasi, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Integrasi keduanya dapat menciptakan generasi yang religius sekaligus nasionalis, yang memiliki kesadaran kritis terhadap isu global seperti intoleransi, korupsi, degradasi moral, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, implementasi sinergi PAI dan PKn dalam praktik pendidikan dapat diwujudkan melalui kurikulum integratif, model pembelajaran berbasis proyek, serta kegiatan kolaboratif yang menggabungkan nilai religius dan kebangsaan. Dengan pendekatan tersebut, lembaga pendidikan mampu menanamkan nilai toleransi, keadilan, serta kesadaran lingkungan sosial sejak dini. Hal ini sejalan dengan cita-cita pendidikan nasional dalam membentuk generasi emas 2045 yang memiliki kompetensi global, tetapi tetap berakar pada nilai Islam dan nasionalisme. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sinergi PAI dan PKn merupakan strategi strategis untuk mewujudkan

pembangunan berkelanjutan sesuai agenda SDGs 2030.

## 6. Referensi

- Abdullah Lawang, K., Karimuddin, K., Ismail, D., Erliana, L., Subki, S., Aji, Y. A., & Syahrul, F. (2024). Building parental awareness of children's education expenses in the Indonesian community in Kuala Lumpur, Malaysia. *Teumulong: Journal of Community Service*, 2(3), 113–122. <https://doi.org/10.62568/jocs.v2i3.127>
- Aji, Y. A. (2025). Strategies for developing the disciplinary character of santri at Dayah Jamiah Al-Aziziyah Batee Iliék Samalanga. *International Conference on Research and Community Services*, 4(1), 205–219.
- Elga Mawarni Santoso, E. M., Efendi, C. N., Ramadhani, R. N., Suryaningsi, S., & Sahwi, F. A. (2022). Pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen strategis dalam membentuk identitas bangsa. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(229021485001).
- Fajri, N., Ramadhan, M. N., Palani, H., & Yazid, E. K. (2021). *Kajian disabilitas, tinjauan peningkatan akses dan taraf hidup penyandang disabilitas Indonesia: Aspek sosioekonomi dan yuridis*.
- Fitriyah, A. W., Bahzar, M., Ningsih, I. W., & Aji, Y. A. (2024). The role of Islamic religion teachers in overcoming egocentrism among students at Madrasah Ibtidaiyah Ibrahimy. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 193–209. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v11i2.9674>
- Khoiriyah, K., Suteja, J., Rintaningrum, R., Ningrum, D. A., & Aji, Y. A. (2025). Haul as a medium for character education: Building local wisdom through Kiai tradition. *Mimbar Agama Budaya*, 42(1), 44–53. <https://doi.org/10.15408/mimbar.v42i1.46282>
- Lawang, K. A. (2025). The role of Islamic law in promoting inclusive and quality education to achieve the SDGs 2030. *Jurnal Kolaboratif Akademika*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.26811/6ffc7z02>
- Makmur, M. G., Robi'ah, R., Dyah, R., Muslimin, M., & Aji, Y. A. (2025). Penerapan nilai-nilai Islam dalam etika profesi kesekretariatan di lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Al-Fikrah*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v14i1.1031>
- Mumpuni, D. A., Muhibbin, A., Magister Pendidikan Dasar, & Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2025). Penguatan karakter kebangsaan melalui pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada siswa kelas V sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 138–151. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.21650>
- Nafasabilla, Z., Yohamintin, Y., Mutsaqofah, M. B., Dianita, D., Syaquina, W., Fadhilah, H. K., & Aji, Y. A. (2025). Educational program: Preventive measures for moral degradation in elementary school children (Alpha Generation). *GSCE:*

- Global Sustainability and Community Engagement*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.62568/gsce.v1i2.231>
- Nurazizah, T. S., Ulfiah, Z., Dewi, D. A., & Hamid, S. I. (2021). Membangun karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5405–5415. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1671>
- Nurhabibi, A., Ismail, D., Kuswandi, D., Dewi, A. F. G. A., & Aji, Y. A. (2025). Strategi lembaga pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa di era digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(2), 249–258. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i2.1527>
- Nuryana, Z., & Asmorojati, A. W. (2022). Anti-corruption action: A project-based anti-corruption education model during COVID-19. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.907725>
- Pradana, Y. (2021). Kampanye nilai-nilai antikorupsi melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *PKn Progresif*, 16(2), 76–85. <https://doi.org/10.20961/pknp.v16i2.49749>
- Zahro, R. A., Aurelia, R. Z., As'syurah, N. D., & Suryaningsi, S. (2025). Menyisipkan ideologi nasionalisme dalam gaya hidup modern anak muda. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(2).
- Rintaningrum, R., Makmur, M., Sari, M. E., Munawar, S., Wulandari, S., & Aji, Y. A. (2025). Konseptualisasi strategi komunikasi Islam dalam merespons isu negatif terhadap lembaga pendidikan keislaman di era digital. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta*, 12(1), 15–30.
- Suryaningsi, S., Alim, S., Wingkolatin, W., & Jamil, J. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan*. Academica.
- Syafuruddin, S., Muhyiddin, M., Mahmudin Nst, A., Wingkolatin, W., Rintaningrum, R., & Aji, Y. A. (2025). The application of Islamic critical thinking in inquiry-based learning in traditional Islamic educational institutions. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 7(1), 860–874. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i1.7264>
- Auly, S. N., Anandhea, Q., Dzatirrajwa, H., & Suryaningsi, S. (2025). Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia: Antara prinsip konstitusional dan realitas praktis. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(2).
- Taopan, N. F., Ly, P., & Lobo, L. (2020). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan kualitas sikap hidup toleransi. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 1(1). <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i1.40086>
- Varzakas, T., & Smaoui, S. (2024). Global food security and sustainability issues: The road to 2030 from nutrition and sustainable healthy diets to food systems change. *Foods*, 13(2), 1–29. <https://doi.org/10.3390/foods13020306>

Youth, S. D. G., & Summer Camp. (n.d.). *The 2030 Agenda for Sustainable Development's 17 Sustainable Development Goals (SDGs)*.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).